



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI MAIDATUL JANAH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 654961

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **800.000.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 1158 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **199.000.000**

1. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MOPEN/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOBIL, HONDA MOPEN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **11.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **38.117.241**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.048.117.241

III. HUTANG

Rp. 171.860.251

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 876.256.990

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.